

ABSTRAK

Fokus dari penelitian ini adalah alasan di balik persetujuan Pemerintahan Obama terhadap pengurangan sanksi nuklir Iran melalui Joint Plan of Action (JPOA). JPOA yang merupakan hasil pembicaraan antara negara-negara P5+1 dengan Iran, disepakati oleh Pemerintahan Obama meskipun selama ini AS memiliki hubungan yang buruk dengan Iran dan telah memberikan berbagai macam sanksi untuk menghindari kepemilikan senjata nuklir oleh Iran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan persetujuan Pemerintahan Obama tersebut dengan menggunakan pendekatan sistemik. Untuk itu, penelitian ini menggunakan tiga instrumen analisis, yaitu konsep kebijakan luar negeri sebagai refleksi proses pembuatan keputusan secara kolektif dengan pendekatan sistem, relasi antara kebijakan luar negeri dengan keamanan nasional, dan pengaruh lingkungan eksternal terhadap kebijakan luar negeri. Argumentasi yang diajukan sebagai jawaban penelitian adalah Pemerintahan Obama menyetujui pengurangan sanksi nuklir Iran karena pengaruh dari sistem internasional, yaitu negara-negara P5+1 lain. Pemerintahan Obama melakukan adaptasi terhadap pendekatan negara-negara P5+1 lain yang lebih kooperatif karena pendekatan tersebut dianggap lebih efektif untuk mencapai tujuan keamanan nasional AS. Pembahasan penelitian menghasilkan kesimpulan yang mendukung argumentasi penelitian, yakni bahwa Pemerintahan Obama, dengan mempertimbangkan keamanan nasional AS, menganggap bahwa pendekatan kooperatif yang dilakukan oleh negara-negara P5+1 lebih efektif dalam menangani kasus nuklir Iran. Cara-cara unilateral dan koersif yang selama ini dilakukan AS tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kasus nuklir Iran dan justru merugikan AS. Pendekatan kooperatif dan multilateral yang dilakukan oleh negara-negara P5+1 menjadi satu-satunya pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan keamanan nasional, sehingga Pemerintahan Obama memutuskan untuk beradaptasi dengan pendekatan tersebut.

Kata Kunci: Pemerintahan Obama, Isu Nuklir Iran, Sistem Internasional, Kebijakan Luar Negeri, Keamanan Nasional